



---

**Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

***The Role of the Office of Population and Family Planning Control in  
Controlling Population Growth***

**Larasati<sup>1)</sup>, Indra Muda<sup>1)</sup>, Beby Masitho Batubara<sup>1)</sup> & Agung Suharyanto<sup>2)</sup>\***

1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, ketetapan kebijakan-kebijakan dan program-program dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan subyek penelitian yakni dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Dari teknik ini diperoleh informan, yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang penyuluhan dan Penggerak, Kepala Bidang Ketahanan, Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, dan masyarakat yang ikut serta dalam program Keluarga Berencana maupun yang tidak mengikuti program Keluarga Berencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peranan dalam menekan pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kegiatan KB, melakukan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan paska pemasangan alat kontrasepsi. Hambatan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan DP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Kata Kunci:** Peranan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pertumbuhan, Penduduk

**Abstract**

*This study aims to find out how the role of the Family Planning Population Control Office, the determination of policies and programs in controlling the population growth rate in Medan City, besides that the author also wants to know the factors that prevent the Population and Family Planning Control Office from controlling growth residents in Medan City. The research technique used is a qualitative research method with interviews and observations. The research subject taking technique is using purposive and snowball techniques. From this technique, informants obtained, consisting of the Head of the Population and Family Planning Control Office, Head of the Family Planning Division, Head of Extension and Penggerak, Head of Resilience, Head of Population Control, Family Planning Field Extension, and the community who participated in the Family program. Planning or those who do not take part in the Family Planning program. Based on the research conducted, it was found several findings that the Office of Population and Family Planning Control has a role in suppressing population growth which includes coordination with government, community and private institutions in family planning activities, conducting family planning counseling, installing contraceptives and post-installation contraception. Obstacles in controlling population growth, namely the lack of skilled technical personnel, inadequate infrastructure, the influence of culture and the level of education of the community also become obstacles to DP2KB in carrying out their duties and functions.*

**Keywords:** Role, Office of Population and Family Planning Control, Growth, Population

**How to Cite:** Larasati, Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *PERSPEKTIF, 8 (1): 13-18.*

---

\*Corresponding author:

ISSN 2085-0328 (Print)

E-mail.: [agungsuaharyanto@staff.uma.ac.id](mailto:agungsuaharyanto@staff.uma.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan menjadi isu yang sangat mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan dengan negara lain, karena pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan.

Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah rencana pembangunan di susun. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari definisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang.

Menurut Karmoto (2004) dalam dasar-dasar demografi, kebijakan kependudukan utama di Indonesia saat ini adalah kebijakan Keluarga Berencana. Kebijakan ini sudah luas diketahui oleh masyarakat, kebijakan Keluarga Berencana ini telah berhasil mengubah pandangan masyarakat yang pro natalis menjadi anti natalis (Chair & Kariono, 2011),

Kota Medan yang merupakan barometer pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di wilayah Sumatera Utara juga mengalami permasalahan dalam hal

padatnya jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk di kota Medan mengakibatkan terdapat banyak lingkungan kumuh yang dari segi ekonomi masyarakatnya masih berada pada garis kemiskinan. Perumahan kumuh tersebut dapat kita lihat di kawasan Medan Utara seperti di Belawan, Labuhan, Tembung, Denai, Sunggal, dan Medan Johor, bahkan pada daerah pusat kota Medan. Kawasan kumuh di Medan Utara merupakan perumahan nelayan yang terletak di bantaran Sungai Deli, sedangkan di pusat kota ada di bantaran Sungai Babura dan daerah pinggir rel kereta api. Munculnya rumah-rumah kumuh menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Sebagai daerah otonom maka di kota Medan dibentuklah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan kesetaraan gender dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota Medan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah kebijakan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana teknis di bidang Keluarga Berencana di kota Medan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga pengendalian penduduk tersebut dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian dari faktor-faktor yang ada akan dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi penelitian tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dilakukan dengan menggambarkan sejauhmana peranan DP2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di kota Medan. Kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam perkaranya. Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting

dalam suatu penelitian, dimana tanpa adanya kegiatan pengumpulan data, maka data yang diperlukan tidak akan bisa diperoleh. Hal ini dilakukan dengan cara:

Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Wawancara Mendalam, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mulai dari bulan juni sampai juli 2018 di Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB (DP2KB) Kota Medan. Maka peneliti mendapat hasil dari jumlah pegawai yang terdapat di DP2KB sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan/ Jabatan	Laki- laki	Perem- puan	Jumla h
1.	Non PNS/Tenaga Honorar	4	2	6
2.	Golongan I	-	-	-
3.	Golongan II	1	3	4
4.	Golongan III	5	26	31
5.	Golongan IV	3	9	12

Jumlah 53

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai DP2KB Kota Medan sudah banyak yang berpendidikan, dan sesuai golongan yang dimiliki maka dapat terlihat

bahwa sebagian besar pegawai DP2KB Kota Medan sudah sarjana. Artinya sebagian besar pegawai DP2KB Kota Medan sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang berpendidikan.

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kota Medan.

Sejalan dengan kebijakan Nasional, maka tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri dimana, kebijakan tersebut mengacu kepada kebijakan pusat. Untuk Kota Medan sendiri kita mempunyai DP2KB. Dimana organisasi pemerintah ini merupakan mitra BKKBN Provinsi dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Medan. Kebijakan kependudukan yang utama saat ini adalah kebijakan keluarga berencana, DP2KB sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah keluarga berencana di daerah dalam menyusun program kerja di daerah, dalam hal ini Kota Medan harus berdasarkan perpaduan antara kebijakan Nasional dan kebijakan yang ada di daerah.

Dalam suatu instansi tidak terkecuali DP2KB untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan, mereka membentuk berbagai bidang yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dari pusat, dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menentukan bidang-bidang yakni: sekretariat, bidang keluarga berencana, bidang penyuluhan dan pergerakan, bidang pengendalian penduduk, serta bidang ketahanan dan kesejahteraan. Setiap bidang yang ada di DP2KB Kota Medan diharapkan dapat mengatasi masalah pertumbuhan penduduk sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang tujuan dari tupoksinya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Jika dilihat dari rincian tugas pokok dan fungsi yang dimiliki bidang keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk langsung terlibat aktif kepada masyarakat, dimana bidang KB tersebut menyusun program-program keluarga berencana guna mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Medan.

Fokus kinerja dari DP2KB Kota Medan sendiri adalah kepada perempuan dan anak

dengan tujuan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat, dimana kesejahteraan itu akan tercapai apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan. Jika dilihat dari program kerja, bidang pengendalian penduduk dan KB bekerja sendiri-sendiri, dimana bidang KB lebih menekankan kepada pemasangan alat KB serta mempromosikan program KB, sedangkan bidang pengendalian penduduk lebih kepada menekan angka pertumbuhan penduduk.

DP2KB merupakan stakeholder dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Peranan DP2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat diharapkan pemerintah.

Tahun pendataan	Jumlah		Rata-Rata Jiwa Per Keluarga
	Keluarga	Jiwa	
2013	433.633	2.065.185	4-5
2014	441.343	2.113.694	4-5
2015	448.953	2.150.057	4-5

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan setiap tahunnya, peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah keluarga dari tahun ke tahun tetap. Rata-rata jiwa dalam keluarga lebih cenderung menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh keluarga dari pada menggambarkan kondisi tingkat fertilitas. Rata-rata jiwa perkeluarga dari tabel tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan program yang diharapkan pemerintah yakni setiap keluarga terdiri dari 4 orang.

Dalam pengendalian jumlah penduduk, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan meliputi peningkatan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan alat kontrasepsi, kerjasama baik dengan pihak pemerintah atau lembaga lain dan dengan pihak swasta.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan kerjasama yang baik, baik itu dengan masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan yang lainnya, demikian juga dengan DP2KB Kota Medan dalam

melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, maka DP2KB Kota Medan menetapkan kebijakan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah dan masyarakat. kerjasama yang di jalani DP2KB dengan lembaga lain adalah dalam hal koordinasi, keterpaduan dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan KB. Koordinasi dan keterpaduan ini dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan dan keselarasan bersama agar mempunyai daya ungkit yang luas kepada pelaksanaan gerakan keluarga berencana nasional dalam rangka responding program, maka fungsi koordinasi dan keterpaduan akan semakin penting. Koordinasi dan keterpaduan bersama dilakukan antara lain melalui forum rapat koordinasi pada setiap wilayah secara teratur, sehingga dapat saling tukar informasi bagi keterpaduan program yang dilakukan bersama. Terselenggaranya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan jumlah aseptor 44,93% dari target, serta terlaksananya kegiatan PKK KB kesehatan dengan pencapaian 15,489 aseptor atau 66,97% dari target. Jika dilihat dari target yang dicapai DP2KB dalam upaya Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, hasil yang di dapatkan jauh dari apa yang di harapkan. Jika dilihat dari segi kelembagaan.

### **Hambatan-hambatan Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Kota Medan**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut sering menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan dalam pengendalian jumlah penduduk untuk kota Medan sendiri mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh DP2KB Kota Medan dalam menekan pertumbuhan penduduk di Kota Medan berasal dari faktor internal dari dalam diri DP2KB itu sendiri dan faktor eksternal dari luar DP2KB itu sendiri dalam hal dari masyarakat.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami BPPKB adalah dari Faktor Internal, pertama Faktor Penghambat dari BPPKB Kota Medan, yaitu Kurangnya Tenaga Teknis, yaitu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki Kader di setiap kecamatan maupun kelurahan dimana setiap kader tersebut diwajibkan melakukan koordinasi dengan DP2KB Kota Medan. Namun, luasnya ruang lingkup yang ada dimana kota Medan terdiri atas 21 Kecamatan menjadikan pemerintah mengalami kesulitan mengingat tenaga teknis yang ada sangat terbatas. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana saat ini adalah sekitar 123 orang untuk 21 kecamatan.

Faktor internal kedua, yaitu Infrastruktur yang Belum Memadai, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka DP2KB Kota Medan memerlukan infrastruktur guna membantu DP2KB Kota Medan dalam bekerja, baik yang digunakan kepada masyarakat maupun yang digunakan oleh DP2KB itu sendiri untuk keperluan kedinasan. Pada saat ini DP2KB Kota Medan telah memiliki 2 mobil penyuluhan serta 5 motor untuk bekerja, di samping itu DP2KB Kota Medan juga memiliki beberapa peralatan kesehatan, namun belum memadai. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada DP2KB membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai sehingga program kerja dapat dilakukan secara maksimal.

Faktor external, yakni Hambatan-Hambatan yang Datang dari Masyarakat, yaitu Pernikahan yang Dilakukan Pada Usia yang Masih Muda (Pernikahan Usia Dini), menurut pandangan beberapa kalangan, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan kita harus memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Dalam mengatur pernikahan itu sendiri pemerintah pusat juga menetapkan peraturan mengenai masalah pernikahan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."*

Undang-undang pernikahan tersebut diatas dapat memicu terjadinya pernikahan diusia yang boleh dikatakan remaja. Usia 16 tahun itu masih termasuk usia yang remaja, sehingga usia pernikahan yang disebutkan

oleh Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencan. Pada umur yang masih 16 tahun secara psikologi seseorang itu belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, BKB mengharapkan usia perkawinan yang ideal adalah umur 25 tahun bagi pria dan umur 21 tahun. Peraturan pemerintah mengenai usia pernikahan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) sangat beresiko tinggi untuk menambah jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam lingkungan keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat rentan melakukan pernikahan usia dini. Kerentanan dalam melakukan pernikahan dini tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan juga peran aktif dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat. Selain itu yang memicu pernikahan di usia muda adalah karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Mereka masih belum menyadari peran dan tanggung jawab yang akan mereka pikul saat berumah tangga nanti. Campur tangan orang tua dalam urusan pernikahan anak juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan yang sangat cepat. Orang tua terkadang ingin cepat menikahkan anaknya karena ingin cepat-cepat mendapatkan keturunan. Untuk kawasan pemukiman kumuh seperti daerah pinggiran rel kereta api permasalahan pernikahan usia dini juga mengalami masalah yang sama yakni masih rendahnya kualitas ekonomi dan kesenjangan pendidikan merupakan hal memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung cepat menikah.

## SIMPULAN

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DP2KB Kota Medan dalam pengendalian jumlah penduduk kota Medan melibatkan peran aktif masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik, baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah

penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Medan terdiri atas hambatan Intern yakni hambatan yang berasal dari dalam DP2KB Kota Medan dan hambatan ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar DP2KB Kota Medan yakni masyarakat. Hambatan yang berasal dari DP2KB itu sendiri yakni kurangnya tenaga teknis dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat meliputi pernikahan usia dini di masyarakat, kurangnya pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat dan tingginya angka kelahiran.

Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana. Namun pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mau berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana walaupun masyarakat sudah mengetahui adanya kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2010), *Kependudukan, Teori, Fakta dan Masalah*. Penerbit Dee Publish, Yogyakarta.
- Adiningsih, S. (2008), *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia*. Pusat Studi Asia Pasifik. PSAP UGM
- Chair, A., & Kariono, (2011), Profesionalisme Aparatur Birokrasi (Studi pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 1-6
- Faturochman dkk. (2004), *Dinamika Kependudukan dan kebijakan*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Hakim, A.B. (2004), *Memelihara Harmoni Dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan Dalam*

- Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Penerbit: Kementerian Agama RI Jakarta  
<http://aktualonline.com/view/sumut/sumut/3276/pertumbuhan-penduduk-kota-medan>  
[http://bsp.go.id/download\\_file/Penduduk\\_Indonesia\\_menurut\\_desa\\_SP2010.pdf](http://bsp.go.id/download_file/Penduduk_Indonesia_menurut_desa_SP2010.pdf) diakses  
<http://erwinredusir.wordpress.com/2012/08/01/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-megkhawatirkan>  
[http://www.pemkomedan.go.id/news\\_detail.php?id=13792](http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=13792)
- Juju, M.K. & Suryawati, (2001). *Sosiologi*, Penerbit: Erlangga Jakarta
- Karmoto, W. (2004). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: FEUI
- Lambelanova, R & Ramadhan, M.B. (2016). "Peranan BPPKB dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan."
- Lembaga Demografi, (2007). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: FEUI.
- Mulyadi, (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Penerbit: Salemba Empat Jakarta
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang (model-model perumusan implementasi dan evaluasi)* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Poerwadarmito, W.J.S. (1985). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- PP No 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
- PP No. 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- PP No. 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Rivai, V. (2016). *Islamic Quality Education Management*, PT. Gramedia Jakarta
- Siagian, S.P. (2001). *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyanto. (2002). *Lembaga Sosial*. Penerbit: Global Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Warrow, M. & Purwaningsih, (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yayat, K. dkk, (2017). *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, Perpustakaan Nasional RI: Terbitan (KDT).